

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kegiatan PKPA memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenal secara langsung bagaimana peran seorang apoteker dijalankan di lapangan. Melalui pengalaman ini, mahasiswa memahami bahwa apoteker tidak hanya bertugas dalam pelayanan obat, tetapi juga berperan penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan di masyarakat.
2. Selama praktik, mahasiswa mempelajari berbagai aspek manajemen apotek, mulai dari proses perencanaan kebutuhan obat, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, hingga pelaporan. Pemahaman ini membantu mahasiswa melihat bagaimana sistem kerja apotek saling berkaitan dan berkontribusi terhadap kelancaran pelayanan kefarmasian.
3. Melalui pengalaman praktik, mahasiswa juga didorong untuk mengembangkan sikap profesional berdasarkan nilai-nilai Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) serta nilai-nilai moral dan etika yang mendukung profesi apoteker. Kegiatan ini menjadi sarana untuk membentuk kepribadian apoteker yang bertanggung jawab, memiliki integritas, dan mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada kemanusiaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kegiatan dan pengalaman selama menjalani PKPA, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi mahasiswa calon apoteker agar pelaksanaan PKPA selanjutnya dapat berjalan lebih optimal, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa calon apoteker, sebaiknya memanfaatkan waktu PKPA untuk memperdalam pengetahuan tentang berbagai jenis obat, cara penggunaannya, serta efek samping yang mungkin terjadi. Pemahaman yang luas akan membantu dalam memberikan pelayanan yang lebih tepat kepada pasien.
2. Diharapkan mahasiswa juga meningkatkan kemampuan komunikasi, baik dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, agar proses penyampaian informasi obat menjadi lebih efektif dan mudah dipahami.
3. Mahasiswa disarankan untuk bersikap aktif dan antusias selama menjalani PKPA, tidak hanya mengikuti instruksi tetapi juga berinisiatif untuk belajar hal baru. Dengan demikian, pengalaman yang diperoleh akan lebih bermakna dan dapat menjadi bekal penting dalam menjalankan profesi apoteker di masa depan

DAFTAR PUSTAKA

- BNF, 2022, *British National Formulary* (BNF) 83 Edition, BMJ Group, London.
- BPOM, 2019. Badan Pengawas Obat Dan Makanan no. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan. Jakarta: Badan POM RI
- Depkes 2006, Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Terbatas. Jakarta : Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Głowacka, K., and Wiela-Hojeńska, A. 2021. Pseudoephedrine Benefits and risks. *International Journal of Molecular Sciences*, **22**(10), 5146.
- Kementerian Kesehatan. 2023. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- McEvoy, Gerald K., et al., 2011, AHFS Drug Information, America Society of Health-System Pharmacist, Inc., Bethesda, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta.
- MIMS Indonesia. 2020. *Bromhexine*. Monthly Index of Medical Specialities.
- MIMS Indonesia. 2022. *Bisoprolol*. Monthly Index of Medical Specialities.
- MIMS Indonesia. 2022. *Candesartan*. Monthly Index of Medical Specialities.
- MIMS Indonesia. 2022. *Etoricoxib*. Monthly Index of Medical Specialities.
- MIMS Indonesia. 2022. *Simvastatin*. Monthly Index of Medical Specialities.
- MIMS Indonesia. 2023. *HCT*. Monthly Index of Medical Specialities.
- MIMS Indonesia. 2023. *Triprolidine*. Monthly Index of Medical Specialities.
- MIMS Indonesia. 2024. *Antasida*. Monthly Index of Medical Specialities.
- MIMS Indonesia. 2024. *Clindamycin*. Monthly Index of Medical Specialities.
- MIMS Indonesia. 2024. *Pseudoephedrine*. Monthly Index of Medical Specialities.

- MIMS Indonesia. 2025. *Cataflam*. Monthly Index of Medical Specialities.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan pembatasan dan Kategori Obat.
- Permenkes. 2015. Permenkes No. 3 Tahun 2015. Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Presiden RI. 2010. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Presiden RI, 1999. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang Obat Wajib Apotek No 3. Jakarta.
- Presiden RI, 1993. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 924/MenKes/SK/X/1993 tentang Obat Wajib Apotek No 2. Jakarta.
- Presiden RI, 1990. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomer 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek No 1. Jakarta.
- Sidik, A.J. 2024. *Diagnosis dan Tata Laksana Dispepsia*. Cermin Dunia Kedokteran,. 51(3). p. 140-144.
- Sweetman. S.C. 2014. *Martindale The Complete Drug Reference*. 38thed. London. Pharmaceutical Press.
- Tjay, T. H., and Rahardja, K. 2015. *Obat Obat Penting Edisi 7*. In Pt Elex Media Komputindo (VII, Vol. 53, Issue 9). PT Elex Media Komputindo.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 35. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Lembaran
Negara RI Tahun 1997, No. 5. Sekretariat Negara. Jakarta.